

Pendampingan Pemulihan Fungsi Administrasi Kampung dalam Penguatan Kapasitas Aparatur dan Kemandirian Pengelolaan Dana Desa di Papua Selatan

Syahrabudin Husein Enala^{1✉}, Nur Jalal², Samuel Atbar³, Muhammad Novan⁴, Prasetya⁵, Frederikus Antonius Mana⁵

¹²³⁵Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Musamus Merauke

⁴Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Musamus Merauke

syahrabudinhuseinenala@gmail.com

Abstrak

Penyelenggaraan administrasi kampung yang belum berjalan optimal menjadi salah satu tantangan utama dalam pengelolaan Dana Desa di wilayah Papua Selatan. Keterbatasan kapasitas aparatur kampung dalam memahami administrasi pemerintahan, pengelolaan keuangan, serta minimnya pemahaman masyarakat terhadap tujuan pembangunan menyebabkan rendahnya efektivitas pemanfaatan Dana Desa. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memulihkan fungsi administrasi kampung melalui pendampingan aparatur kampung serta peningkatan pemahaman masyarakat guna mendorong kemandirian dalam pengelolaan Dana Desa. Metode yang digunakan meliputi pendidikan masyarakat, pelatihan aparatur kampung, dan pendampingan administratif secara partisipatif. Kegiatan dilaksanakan melalui sosialisasi, pelatihan administrasi dasar, pendampingan penyusunan laporan keuangan dan kegiatan, serta diskusi bersama masyarakat kampung. Hasil pengabdian menunjukkan adanya peningkatan pemahaman aparatur kampung dalam menjalankan fungsi administrasi dan pengelolaan Dana Desa secara lebih tertib dan akuntabel. Selain itu, masyarakat mulai memahami pentingnya perencanaan pembangunan kampung dan peran mereka dalam mendukung program pembangunan. Kegiatan ini berkontribusi pada peningkatan wawasan masyarakat serta memperkuat kemandirian kampung dalam pengelolaan Dana Desa secara berkelanjutan.

Kata Kunci: administrasi kampung, Dana Desa, kapasitas aparatur

Abstract

Village administration that does not function optimally remains a major challenge in managing Village Funds in South Papua. Limited administrative capacity of village officials, weak financial management skills, and low public awareness of development objectives have reduced the effectiveness of Village Fund utilization. This community service activity aims to restore village administrative functions by strengthening the capacity of village officials and enhancing community awareness to support independent Village Fund management. The methods employed include community education, training for village officials, and participatory administrative assistance. Activities were conducted through socialization sessions, basic administrative training, assistance in preparing financial and activity reports, and community discussions. The results indicate improved understanding and skills among village officials in managing administrative and financial tasks more systematically and accountably. Furthermore, community members demonstrated increased awareness of the importance of village development planning and their role in supporting development programs. This activity contributes to enhancing community knowledge and strengthening village self-reliance in sustainable Village Fund management.

Keywords: village administration, Village Fund, capacity building

PENDAHULUAN

Pengelolaan Dana Desa merupakan salah satu instrumen strategis pemerintah dalam mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kampung, khususnya di wilayah tertinggal dan terluar seperti Papua Selatan. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kampung diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengelola sumber daya dan keuangan secara mandiri guna memenuhi kebutuhan pembangunan lokal. Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut di tingkat kampung masih menghadapi berbagai kendala administratif dan sosial, terutama terkait kapasitas aparatur kampung dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Di Kabupaten Merauke dan wilayah sekitarnya, permasalahan utama yang sering dijumpai adalah belum optimalnya fungsi administrasi pemerintahan kampung. Banyak aparatur kampung masih mengalami keterbatasan dalam penguasaan administrasi dasar, seperti pengelolaan dokumen, penggunaan perangkat teknologi sederhana (laptop dan printer), serta penyusunan laporan keuangan dan laporan kegiatan Dana Desa. Kondisi ini menyebabkan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pembangunan kampung berjalan tidak efektif dan berpotensi menimbulkan kesalahan administratif (Aziz, 2016; Kementerian Desa PDTT, 2020).

Selain persoalan aparatur, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap tujuan dan mekanisme pembangunan kampung turut memengaruhi efektivitas pemanfaatan Dana Desa. Masyarakat kampung cenderung memosisikan diri sebagai penerima pasif bantuan, tanpa pemahaman yang memadai mengenai peran mereka dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan pembangunan. Akibatnya, berbagai program bantuan yang diberikan sering kali tidak berkelanjutan dan tidak memberikan nilai tambah ekonomi maupun peningkatan kesejahteraan secara nyata (Chambers, 1997; Mardiasmo, 2018).

Dari perspektif administrasi publik, kapasitas aparatur dan partisipasi masyarakat merupakan dua pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan publik. Pendekatan *good governance* menekankan pentingnya peningkatan kompetensi aparatur di tingkat lokal serta keterlibatan aktif masyarakat sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan (Osborne, 2006; UNDP, 1997). Tanpa penguatan pada kedua aspek tersebut, pembangunan kampung berisiko hanya bersifat administratif dan tidak mampu mendorong kemandirian masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dirancang sebagai upaya pemulihkan fungsi administrasi kampung melalui pendekatan pendampingan aparatur dan penyadaran masyarakat. Kegiatan ini menitikberatkan pada penguatan keterampilan administrasi dasar aparatur kampung serta peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pembangunan kampung yang partisipatif dan berkelanjutan. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan karakter PkM dasar yang berorientasi pada peningkatan kapasitas, perubahan pola pikir, dan manfaat langsung bagi masyarakat.

Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan kapasitas aparatur kampung dalam menjalankan fungsi administrasi dan pengelolaan Dana Desa secara sederhana dan aplikatif, serta meningkatkan wawasan dan kesadaran masyarakat mengenai peran mereka dalam pembangunan kampung. Melalui kegiatan ini diharapkan terjadi peningkatan pemahaman, partisipasi, dan kemandirian kampung yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Papua Selatan.

METODE

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif dan pendampingan langsung, yang bertujuan untuk memulihkan fungsi administrasi kampung serta meningkatkan kapasitas aparatur dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pembangunan kampung. Metode pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kondisi riil kampung sasaran di Papua Selatan, yang ditandai oleh keterbatasan sumber daya manusia, sarana administrasi, dan pemahaman masyarakat.

Metode yang digunakan dalam kegiatan PkM ini meliputi:

a) Pendidikan Masyarakat

Pendidikan masyarakat dilakukan melalui kegiatan penyuluhan dan diskusi kelompok yang ditujukan kepada masyarakat kampung. Materi penyuluhan difokuskan pada pemahaman dasar mengenai:

1. tujuan pembangunan kampung,
2. peran masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan Dana Desa, serta
3. pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keberlanjutan program pembangunan.

Kegiatan ini dilaksanakan secara dialogis dengan bahasa sederhana agar mudah dipahami oleh masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan beragam. Pendidikan masyarakat bertujuan untuk mengubah pola pikir masyarakat dari bersifat pasif menjadi lebih sadar dan peduli terhadap pembangunan kampung.

b) Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Ipteks)

Difusi Ipteks dilakukan melalui pengenalan dan pemanfaatan teknologi administrasi sederhana kepada aparatur kampung. Kegiatan ini meliputi:

1. penggunaan laptop dan printer untuk administrasi kampung,
2. pengenalan format sederhana dokumen administrasi dan laporan kegiatan, serta
3. contoh pengelolaan arsip kampung yang tertib dan mudah diakses.

Luaran dari kegiatan ini berupa contoh dokumen administrasi kampung dan format laporan sederhana yang dapat langsung digunakan oleh aparatur kampung dalam pengelolaan Dana Desa.

c) Pelatihan

Pelatihan ditujukan kepada aparatur kampung dengan metode demonstrasi dan praktik langsung. Materi pelatihan meliputi:

1. penyusunan administrasi dasar kampung,
2. pencatatan keuangan sederhana Dana Desa, dan
3. penyusunan laporan pertanggungjawaban kegiatan.

Pelatihan dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan aparatur kampung, sehingga dapat meningkatkan keterampilan praktis yang langsung dapat diterapkan dalam tugas sehari-hari.

d) Mediasi

Tim pelaksana PkM berperan sebagai mediator dalam memfasilitasi komunikasi antara aparatur kampung dan masyarakat. Mediasi dilakukan melalui forum musyawarah kampung untuk:

1. menyelaraskan kebutuhan masyarakat dengan program pembangunan kampung,
2. menjelaskan keterbatasan dan mekanisme pengelolaan Dana Desa, serta
3. mendorong terciptanya kesepahaman antara masyarakat dan aparatur kampung.

Mediasi ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan komunikasi dan mencegah kesalahpahaman dalam pelaksanaan pembangunan kampung.

e) Advokasi dan Pendampingan

Advokasi dilakukan dalam bentuk **pendampingan berkelanjutan** kepada aparatur kampung dan masyarakat selama pelaksanaan kegiatan. Pendampingan meliputi:

1. asistensi dalam penyusunan administrasi dan laporan Dana Desa,
2. pendampingan masyarakat dalam memahami dan memanfaatkan program pembangunan kampung, serta
3. penguatan peran aparatur kampung sebagai pengelola dan fasilitator pembangunan.

Pendampingan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dapat diterapkan secara mandiri dan berkelanjutan oleh aparatur dan masyarakat kampung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemulihan Fungsi Administrasi Kampung melalui Difusi Ipteks dan Pelatihan

Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat menunjukkan adanya perbaikan nyata dalam penyelenggaraan administrasi kampung setelah dilakukan kegiatan difusi ilmu pengetahuan dan teknologi (Ipteks) serta pelatihan administrasi dasar. Pada tahap awal pelaksanaan PkM, kondisi administrasi kampung masih berjalan secara tidak tertib. Dokumen perencanaan, laporan kegiatan, dan administrasi keuangan Dana Desa belum tersusun secara sistematis, sebagian masih disimpan secara manual tanpa pengarsipan yang jelas, serta penyusunan laporan sering mengalami keterlambatan. Aparatur kampung juga cenderung bergantung pada pihak eksternal, seperti pendamping desa atau pihak kecamatan, dalam menyelesaikan administrasi dan laporan pertanggungjawaban.

Melalui kegiatan difusi Ipteks, aparatur kampung diperkenalkan pada penggunaan teknologi administrasi sederhana yang disesuaikan dengan kondisi riil kampung, antara lain pemanfaatan laptop dan printer yang tersedia, serta penggunaan format dokumen administrasi yang sederhana dan mudah dipahami. Tim PkM tidak memperkenalkan sistem administrasi yang kompleks, melainkan menyesuaikan materi dengan kemampuan aparatur kampung dan keterbatasan sarana yang ada di lapangan. Pendekatan ini memudahkan aparatur dalam menerima dan menerapkan pengetahuan baru secara bertahap.

Pelatihan administrasi dasar yang dilaksanakan dengan metode demonstrasi dan praktik langsung membantu aparatur kampung memahami alur kerja administrasi secara konkret, mulai dari pencatatan kegiatan, penyusunan dokumen pendukung, hingga penyusunan laporan keuangan sederhana Dana Desa. Aparatur kampung dilibatkan secara aktif dalam setiap sesi pelatihan, sehingga mereka tidak hanya menerima materi secara teoritis, tetapi juga langsung mempraktikkan penyusunan dokumen sesuai dengan kebutuhan kampung.

Hasil observasi selama kegiatan menunjukkan bahwa aparatur kampung mulai mampu menyusun dokumen administrasi dan laporan kegiatan secara lebih rapi dan terstruktur dibandingkan kondisi sebelum kegiatan PkM dilaksanakan. Meskipun kemampuan aparatur belum sepenuhnya optimal, terjadi peningkatan pemahaman dan keterampilan dasar dalam menjalankan fungsi administrasi kampung. Temuan ini mengindikasikan bahwa pendekatan pelatihan berbasis praktik dan difusi Ipteks yang kontekstual efektif dalam memulihkan fungsi administrasi kampung yang sebelumnya belum berjalan secara optimal, serta menjadi fondasi awal bagi peningkatan tata kelola pemerintahan kampung yang lebih tertib dan akuntabel.

2. Penguatan Kapasitas Aparatur Kampung melalui Pelatihan dan Pendampingan

Pelatihan administrasi dasar yang dilaksanakan secara bertahap memberikan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas aparatur kampung dalam menjalankan fungsi pemerintahan kampung. Sebelum kegiatan PkM dilaksanakan, aparatur kampung cenderung kurang percaya diri dalam mengelola administrasi dan Dana Desa, terutama dalam penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban kegiatan. Kondisi ini menyebabkan aparatur lebih banyak bergantung pada pihak eksternal, seperti pendamping desa atau aparat di tingkat distrik.

Melalui pelatihan yang dikombinasikan dengan pendampingan langsung, aparatur kampung memperoleh ruang belajar yang bersifat praktis dan kontekstual. Aparatur tidak hanya menerima materi pelatihan, tetapi juga didampingi secara langsung dalam mengerjakan administrasi kampung yang sedang berjalan. Pendampingan memungkinkan aparatur untuk berkonsultasi, mengidentifikasi kesalahan administrasi, serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan sesuai

dengan kebutuhan nyata di lapangan. Proses ini berkontribusi pada meningkatnya kepercayaan diri aparatur dalam menjalankan tugas pemerintahan sehari-hari.

Secara teoritik, penguatan kapasitas aparatur merupakan elemen kunci dalam tata kelola pemerintahan yang efektif. Grindle (1997) menekankan bahwa kapasitas institusi publik tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya, tetapi juga oleh kemampuan aktor birokrasi dalam menjalankan fungsi dan perannya secara konsisten. Sementara itu, UNDP (2009) menjelaskan bahwa capacity development merupakan proses jangka panjang yang mencakup peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap, serta sistem pendukung yang memungkinkan individu dan organisasi bekerja secara efektif.

Pendekatan pendampingan yang digunakan dalam kegiatan PkM ini juga sejalan dengan pandangan Eade (1997) yang menyatakan bahwa pendampingan (facilitation and accompaniment) lebih efektif dibandingkan pelatihan satu arah, karena memungkinkan terjadinya proses belajar bersama dan penguatan kemandirian aktor lokal. Dalam konteks pemerintahan kampung, pendampingan berkelanjutan membantu aparatur untuk memahami administrasi bukan sekadar sebagai kewajiban teknis, tetapi sebagai bagian dari akuntabilitas publik.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa aparatur kampung mulai mampu menjalankan fungsi administrasi secara lebih mandiri dan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada pihak luar. Meskipun kapasitas aparatur masih perlu terus ditingkatkan, proses pelatihan dan pendampingan telah membentuk dasar kemandirian aparatur kampung dalam pengelolaan administrasi dan Dana Desa. Dengan demikian, penguatan kapasitas aparatur melalui pendekatan pelatihan dan pendampingan berkesinambungan menjadi strategi yang relevan dalam mendorong tata kelola pemerintahan kampung yang lebih efektif dan akuntabel di Papua Selatan.

3. Peningkatan Wawasan dan Kesadaran Masyarakat melalui Pendidikan Masyarakat dan Mediasi

Kegiatan pendidikan masyarakat yang dilaksanakan melalui penyuluhan dan diskusi kelompok memberikan kontribusi terhadap peningkatan wawasan dan kesadaran masyarakat mengenai pembangunan kampung dan pengelolaan Dana Desa. Sebelum kegiatan PkM dilaksanakan, sebagian masyarakat masih memiliki pemahaman yang terbatas dan cenderung memandang pembangunan kampung sebagai tanggung jawab pemerintah semata. Kondisi ini berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam musyawarah kampung serta lemahnya pengawasan sosial terhadap pelaksanaan pembangunan.

Melalui pendekatan pendidikan masyarakat yang dialogis dan menggunakan bahasa sederhana, masyarakat mulai memahami tujuan pembangunan kampung, mekanisme perencanaan dan penggunaan Dana Desa, serta peran mereka dalam mendukung keberhasilan pembangunan. Diskusi kelompok memberi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pandangan, pengalaman, dan aspirasi secara terbuka, sehingga proses pembelajaran berlangsung dua arah dan kontekstual dengan realitas kampung.

Secara teoritik, peningkatan kesadaran masyarakat merupakan prasyarat penting bagi pembangunan partisipatif. Arnstein (1969) menekankan bahwa partisipasi masyarakat tidak hanya sebatas kehadiran dalam forum, tetapi mencerminkan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Sementara itu, Chambers (1997) menyatakan bahwa pembangunan yang berkelanjutan harus bertumpu pada pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan dan kesadaran kritis terhadap lingkungan sosial dan kebijakan publik yang memengaruhi kehidupan mereka.

Selain pendidikan masyarakat, kegiatan mediasi melalui forum musyawarah kampung berperan penting dalam memperbaiki komunikasi antara aparatur kampung dan masyarakat. Mediasi membantu menjembatani perbedaan persepsi dan kepentingan, sekaligus membangun saling pengertian antara kedua pihak. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat mulai lebih aktif dalam menyampaikan aspirasi dan terlibat dalam musyawarah kampung. Temuan ini

sejalan dengan pandangan Habermas (1984) mengenai pentingnya ruang komunikasi yang deliberatif dalam menciptakan keputusan publik yang inklusif dan legitimitas kebijakan di tingkat lokal.

Peningkatan wawasan dan kesadaran masyarakat yang terbentuk melalui pendidikan dan mediasi ini menjadi fondasi awal bagi tumbuhnya partisipasi masyarakat yang lebih berkelanjutan dalam pembangunan kampung.

4. Implikasi terhadap Kemandirian Kampung dalam Pengelolaan Dana Desa

Pemulihan fungsi administrasi kampung, penguatan kapasitas aparatur, serta peningkatan kesadaran masyarakat berimplikasi langsung terhadap meningkatnya kemandirian kampung dalam pengelolaan Dana Desa. Kampung menunjukkan kesiapan awal untuk menjalankan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel, dengan melibatkan aparatur dan masyarakat secara lebih seimbang dalam proses pembangunan.

Kemandirian kampung yang mulai terbentuk tidak hanya tercermin dari kemampuan aparatur dalam mengelola administrasi dan keuangan Dana Desa, tetapi juga dari meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pembangunan kampung sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan bersama. Masyarakat mulai memahami bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana yang diterima, tetapi juga oleh keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.

Pandangan ini sejalan dengan konsep local governance yang menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan pembangunan lokal (Rhodes, 1996). Selain itu, Ostrom (1990) menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan sumber daya bersama sangat ditentukan oleh kapasitas institusi lokal dan partisipasi aktor-aktor di tingkat komunitas. Dalam konteks kampung, Dana Desa dapat dipandang sebagai sumber daya bersama yang memerlukan tata kelola partisipatif agar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Dengan demikian, kegiatan PkM ini berkontribusi dalam memperkuat tata kelola pemerintahan kampung dan mendorong pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat di Papua Selatan. Meskipun kemandirian kampung yang terbentuk masih berada pada tahap awal, hasil kegiatan ini menjadi pijakan penting bagi penguatan pembangunan kampung yang berkelanjutan dan berbasis partisipasi masyarakat.

SIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif melalui pendidikan masyarakat, difusi Ipteks, pelatihan, mediasi, dan pendampingan mampu berkontribusi dalam memulihkan fungsi administrasi kampung, memperkuat kapasitas aparatur, serta meningkatkan wawasan dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pembangunan kampung dan pengelolaan Dana Desa. Aparatur kampung mulai menunjukkan peningkatan kemampuan dan kemandirian dalam menjalankan administrasi dan pengelolaan keuangan secara lebih tertib dan akuntabel, sementara masyarakat menjadi lebih memahami peran dan tanggung jawabnya dalam proses pembangunan. Meskipun hasil yang dicapai masih berada pada tahap awal, kegiatan ini menjadi fondasi penting bagi penguatan tata kelola pemerintahan kampung dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan di Papua Selatan, serta menunjukkan bahwa pendampingan kontekstual dan berkelanjutan merupakan strategi yang relevan dalam mendorong kemandirian kampung.

DAFTAR PUSTAKA

- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Aziz, N. L. L. (2016). Otonomi desa dan efektivitas Dana Desa. *Jurnal Penelitian Politik*, 13(2), 193–211.

- Chambers, R. (1997). *Whose reality counts? Putting the first last*. London: Intermediate Technology Publications.
- Eade, D. (1997). *Capacity-building: An approach to people-centred development*. Oxford: Oxfam.
- Grindle, M. S. (1997). *Getting good government: Capacity building in the public sectors of developing countries*. Cambridge, MA: Harvard Institute for International Development.
- Habermas, J. (1984). *The theory of communicative action*. Boston, MA: Beacon Press.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2020). *Pedoman umum pengelolaan Dana Desa*. Jakarta: Kemendes PDTT.
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi dan manajemen keuangan daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Osborne, S. P. (2006). The new public governance? *Public Management Review*, 8(3), 377–387
<https://doi.org/10.1080/14719030600853022>
- Ostrom, E. (1990). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Rhodes, R. A. W. (1996). The new governance: Governing without government. *Political Studies*, 44(4), 652–667.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- United Nations Development Programme. (1997). *Governance for sustainable human development*. New York, NY: UNDP.